

## BAB 4

### KONFLIK EKOLOGI POLITIK ANTARA PEMERINTAH VERSUS MASYARAKAT OGONI, PADA TAHUN 1993-1998

Analisis dalam konflik ekologi politik ini akan dimulai dari analisis secara umum mengenai kondisi negara dan rezim yang berkuasa di Nigeria pada kurun waktu 1993 – 1998, dengan menggunakan teori Negara Otoriter Birokratis (*Bureaucratic-Authoritarian State*). Untuk lebih memperjelas lagi kepentingan yang dimiliki oleh masing – masing aktor dalam perspektif ekologi politik, *actor approach* sebagai sebuah pendekatan inti dalam kajian ekologi politik ini akan digunakan dengan menggunakan teori negara dan *grassroots actors*. Selanjutnya untuk melengkapi pembahasan dan analisis mengenai konflik kepentingan yang terjadi antara negara dan masyarakat hingga menjadi sebuah konflik ekologi politik yang berkepanjangan, penulis akan mencoba menganalisis menggunakan teori konflik sosial yang berkepanjangan (*Protracted Social Conflict*).

#### 4.1. Nigeria dan Bentuk Negara Otoriter Birokratis

Dalam teorinya tentang Negara Otoriter Birokratis (*Bureaucratic-Authoritarian State*), O'Donnell mengemukakan bahwa teori ini merupakan perluasan dan bentuk baru dari otoritarianisme tradisional. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh O'Donnell dalam teori ini yang bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana dapat terbentuknya dan menguatnya kondisi pemerintahan otoriter Nigeria selama bertahun – tahun lamanya. Ia mengemukakan, bahwa pengalaman otoritarian yang ia kategorikan ke dalam Negara Otoriter Birokratis seperti di Amerika Latin terbentuk atas peran serta dari para teknokrat dan militer profesional. Hal yang serupa juga dialami oleh Nigeria.

Menurut O'Donnell, rezim dalam Negara Otoriter Birokratis kebanyakan lebih menyangkan pada sebuah koalisi antara elit - elit militer dengan pihak teknokrat bisnis yang dalam kerjanya memiliki keterkaitan atau asosiasi secara langsung dengan modal asing.<sup>247</sup> Untuk itu dalam teori ini O'Donnell sangat

---

<sup>247</sup>Guillermo O'Donnell, dalam Gerardo Luis Munck dan Richard Owen Snyder, *op.cit.*, hlm 273.

mengaitkan masalah otoritarianisme dengan tahap pembangunan ekonomi.<sup>248</sup> Tidak dapat dipungkiri, bahwa semenjak Nigeria meraih kemerdekaan dalam jangka waktu yang tidak lama setelah ditemukannya sumber daya minyak di daerah selatan Nigeria, pembangunan ekonomi dengan segera menjadi perhatian utama. Pembangunan ekonomi diukur dari tumbuh dan semakin berkembangnya industri (terutama industri minyak), yang secara langsung memiliki kaitan yang erat dengan modal asing. Tidak hanya di Amerika Latin, di Negara Dunia Ketiga seperti Nigeria, industrialisasi yang terjadi justru tidak menghasilkan pemerintahan yang demokratis, tapi malah menghasilkan rezim otoriter birokratis. Kebanyakan elit militer di Nigeria berperan penting dalam mendorong dan membantu para pebisnis asing dalam menjalankan kegiatannya industrinya. Walaupun semata – mata demi meningkatkan pembangunan ekonomi, namun demikian di satu sisi hal ini semakin memperkuat kecenderungan pemerintahan otoriter birokratis.

Rezim militer Nigeria tidak memainkan pola otoritarian model tradisional, tetapi dalam fungsi dan peran mereka sebagai birokrat, militer telah ikut campur secara penuh dalam manajemen ekonomi dan negara, terkait dengan pembangunan ekonomi. Sehingga bisa dikatakan Nigeria telah menjadi sebuah Negara Otoriter Birokratik. Pemerintah lebih berpihak pada pemodal, terutama pemodal asing yang akan memberikan modal dan teknologi dan akses ke pasar internasional terutama dalam industri minyak. Di satu sisi hal ini dilakukan karena ketidakmampuan negara untuk menyediakan teknologi bagi industri mereka sendiri.

Di sisi lain, hal ini juga diakibatkan dari status dan kondisi Nigeria sebagai sebuah negara yang baru merdeka, yang belum memiliki kemampuan, sumber daya dan akses dalam perdagangan internasional. Keberpihakan dan kerjasama yang begitu erat antara rezim militer Nigeria dengan pihak pemodal asing (seperti *Shell Petroleum Development Company*, misalnya), secara langsung telah menciptakan sebuah rezim yang otoriter birokratis. Seperti yang dikemukakan oleh O'Donnell, Untuk memenuhi permintaan akan sumber daya modal,

---

<sup>248</sup> *Ibid.*

tekhokrat dengan dukungan rezim militer yang mengambil alih kekuasaan, menciptakan rezim birokratik otoriter.

Ketegangan yang terjadi antara masyarakat dan Negara Otoriter Birokratis menurut O'Donnell juga merupakan salah satu akibat dari ketergantungan dan peningkatan industrialisasi yang dilakukan oleh negara. Untuk itu, kekerasan dan tindakan represif kerap mewarnai Negara Otoriter Birokratis. Negara tidak segan – segan untuk meniadakan kelas – kelas subordinat akibat tuntutan – tuntutan politik yang datang dari kalangan masyarakat kelas bawah seputar dampak industrialisasi. Rezim militer Nigeria sendiri secara jelas telah mengabaikan hak – hak etnis – etnis minoritas Nigeria, dengan pola alokasi pendapatan yang tidak adil dan merata. Karena kebanyakan pemerintah otoriter birokrasi sangat anti dengan demokrasi, mereka tidak segan – segan untuk melakukan kekerasan terutama pada masyarakat kelas bawah yang terus melancarkan tuntutan – tuntutan kepada pemerintah. Jika di Amerika Latin rezim militer melakukan perang kotor (*dirty war*), rezim militer Nigeria sendiri selama kurun waktu 1993-1998 misalnya, telah melakukan strategi 'pembersihan' terhadap etnis minoritas yang terus melancarkan tuntutan seperti masyarakat Ogoni. Hal ini tak lain dilakukan demi menyingkirkan rakyat dari kedudukan-kedudukan politik yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang di lakukan oleh negara. Negara menjadi sangat mandiri dalam menghadapi masyarakatnya.

Nigeria merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi rezim militer yang kuat diantara sekian banyak negara di benua Afrika. Pemerintahan otoritarian di Nigeria telah berjalan semenjak Nigeria meraih kemerdekaannya dari koloni Inggris, dan kecenderungan pemerintahan yang otoriter itu terus berjalan hingga tahun 1990-an. Walaupun rezim militer yang berkuasa silih berganti akibat kudeta, namun secara umum keberadaan rezim militer di Nigeria telah memegang kekuasaan dalam waktu yang cukup lama. Seperti yang dikemukakan oleh O'Donnell bahwa perbedaan utama antara rezim otoriter dengan dengan rezim otoriter birokratik adalah kondisi rezim otoriter birokratis yang jauh lebih stabil dan permanen karena hubungannya yang cukup kuat dengan pihak jaringan modal asing. Hal ini sekaligus menjadi kekhawatiran dari O'Donnell, menurutnya, modernisasi yang terjadi di negara dunia ketiga melalui

industrialisasi justru dapat menyebabkan berdirinya dan menguatnya struktur otoritarian daripada aksi mobilisasi untuk menghapus itu semua. Hal inilah yang terjadi pada Nigeria selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an, dan hal ini juga yang mungkin menyebabkan terjadinya kudeta selama berkali – kali di Nigeria. Karena dalam tubuh militer sendiripun tidak memiliki kekuasaan yang tunggal, kekuasaan seringkali didistribusikan diantara kelompok – kelompok elit militer, akibat ketidakmampuan seorang penguasa tunggal (bahkan militer sekalipun) yang dapat melakukan pertanggungjawaban secara penuh dalam sistem semacam itu. Jika hal itu semua terus terjadi (kudeta militer), negara, akan berada dalam krisis legitimasi.

#### **4.2. Actor Approach dan Interkonektivitas dalam Kajian Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga**

Pada banyak Negara Dunia Ketiga, permasalahan lingkungan yang berujung pada terjadinya konflik (ekologi politik) tidak dapat dilepaskan dari peran serta aktor – aktor yang terlibat di dalamnya. *Actor approach* sebagai salah satu pendekatan dalam studi ekologi politik di Negara Dunia Ketiga merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam mengkaji konflik berbasis lingkungan yang kerap kali terjadi di Negara Dunia Ketiga. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai fenomena konflik ekologi politik di Negara Dunia Ketiga beserta kepentingan – kepentingan yang melatarbelakangi tindakan para aktor tersebut, berikut dengan kekuasaan yang dimiliki masing – masing aktor. Dengan demikian konflik ekologi bisa dikatakan juga merupakan sebuah fenomena konflik kepentingan antara aktor – aktor yang terkait terutama akan cara pandang dan perilaku mereka terhadap lingkungan.

Di sisi lain, dengan adanya interkonektivitas maupun interdisipliner dalam kajian ekologi politik, kepentingan – kepentingan yang melandasi aksi tiap – tiap aktor akan semakin jelas terlihat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kajian ekologi politik tidak berdiri sendiri dalam suatu ruang yang vakum, di mana kajian ini tidak semata – mata berdiri sendiri tanpa adanya kontribusi dari kajian – kajian sosial lainnya. Tanpa adanya interkonektivitas dan interdependensi dalam kajian ekologi politik, barangkali akan sulit untuk melakukan analisa

mengenai kepentingan di balik layar para aktor – aktor tersebut sehingga dapat menyebabkan sebuah konflik ekologi politik. Karena hingga saat ini lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sebuah entitas tersendiri, tapi lingkungan memiliki makna dan nilai yang berbeda – beda bagi tiap – tiap aktor yang terlibat dalam konflik. Makna maupun nilai yang berbeda – beda itu hanya dapat dijelaskan melalui adanya interkoneksi dalam kajian ekologi politik ini.

Perhatian akan adanya hubungan kekuasaan juga tidak akan terlepas dari kajian ekologi politik ini. Kekuasaan membawa pengaruh juga pada besarnya atau seberapa jauhnya tindakan maupun aksi yang dilakukan oleh masing – masing aktor dalam konflik untuk mencapai kepentingan masing – masing. Tentu saja hubungan kekuasaan yang terjadi tidak akan lepas dari konteks politik masing – masing aktor. Di kebanyakan Negara Dunia Ketiga, relasi hubungan kekuasaan seringkali bersifat asimetris. Seperti yang dikemukakan oleh Bryant.<sup>249</sup>

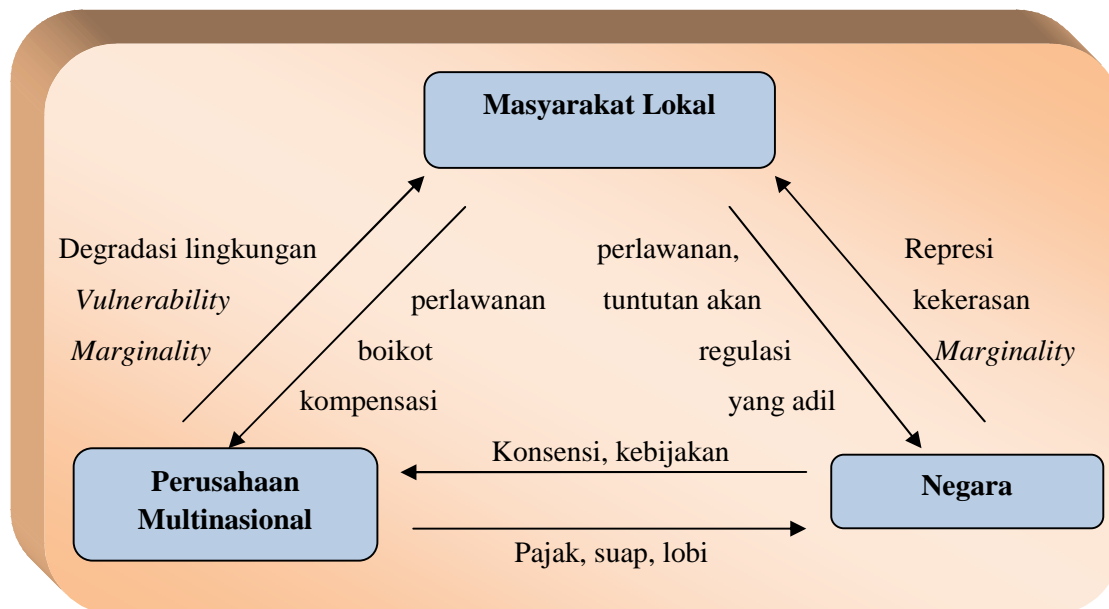
“Hubungan yang tidak seimbang antara aktor – aktor yang ada merupakan faktor kunci dalam memahami pola interaksi antara manusia dan alam maupun dalam masalah – masalah lingkungan yang berhubungan, semakin terakumulasi di kebanyakan Negara Dunia Ketiga. Hubungan tidak seimbang yang ada haruslah disetarakan, termasuk dalam hal kekuasaan yang dimiliki oleh tiap aktor baik dalam jumlah besar atau lebih kecil, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil dari konflik ekologi di Negara Dunia Ketiga. Kekuasaan, bagi para ilmuwan ekologi politik merupakan konsep kunci dalam usaha untuk menentukan peta hubungan dalam proses politisasi lingkungan.”

Hubungan kekuasaan antara aktor – aktor yang terlibat di dalam konflik ekologi politik di Negara Dunia Ketiga, terutama di Nigeria oleh penulis digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>249</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 32

**Gambar 4.1. Relasi Asimetris antara Aktor – Aktor  
dalam Konflik Ekologi Politik di Nigeria**



Untuk mengkaji lebih dalam konflik kepentingan yang terjadi antara negara dan masyarakat lokal, penulis akan membaginya berdasarkan analisis pada masing – masing aktor melalui pendekatan aktor (*actor approach*) berikut ini dikaitkan dengan konteks kajian ekologi politik di Negara Dunia Ketiga di bawah ini.

#### **4.2.1. Kepentingan Negara dalam Konflik Ekologi Politik di Ogoni (Tinjauan Analisis Negara dalam Kajian Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga)**

Keberadaan negara sebagai salah satu aktor dalam pendekatan aktor (*actor approach*) sangatlah penting dalam hubungan interaksi yang ada. Negara dapat dikatakan merupakan sebuah aktor kunci yang memainkan peranan penting bagi terjadinya konflik ekologi politik di Negara Dunia Ketiga. Dalam kaitannya dengan konflik ekologi politik yang terjadi di Ogoni, pihak militerlah yang memainkan peranan signifikan dalam setiap interaksi maupun aksi yang terjadi selama kurun waktu 1993 – 1998. Di bawah rezim militer pimpinan Jendral Sani Abacha, kepentingan negara akan perkembangan industri minyak nampak terlihat.

Hal ini terkadang menjadi sebuah paradoks akan fungsi dari negara itu sendiri. Kepentingan yang ada di balik tindakan yang selama ini dilakukan oleh negara (dalam konflik ekologi politik yang terjadi) semakin menyiratkan cara pandang maupun nilai – nilai yang dikedepankan negara mengenai lingkungan ataupun sumber daya alam yang ada.

Adanya fakta – fakta yang begitu jelas bahwa *SPDC* telah menimbulkan dampak degradasi lingkungan yang begitu besar di Ogoni, tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga turut memainkan peran penting bagi terjadinya berbagai degradasi lingkungan tersebut, yang secara langsung membawa dampak bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat. Terjadinya *marginality*, *vulnerability* maupun *scarcity*, pada akhirnya menjadi sebuah konsekuensi logis dari terjadinya degradasi lingkungan di tanah Ogoni. Bukan hanya disebabkan karena sumber mata pencaharian masyarakat yang benar – benar bergantung kepada alam tersebut hilang atau rusak, tapi juga dikarenakan karakteristik *kleptocracies* dari negara yang membuat keadaan masyarakat lokal seperti Ogoni semakin parah, atau dengan kata lain adanya ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan. Rezim militer di Nigeria (termasuk pada tahun 1993-1998), dalam menanggapi permasalahan lingkungan, seringkali tidak memainkan peran dan fungsinya dengan baik. Seperti yang dikemukakan Walker, “daripada menjadi aktor yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi, negara justru memiliki kecenderungan untuk memperburuk keadaan. Hal ini semata – mata juga dikarenakan sebuah paradoks akan fungsi dari negara itu sendiri”.<sup>250</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Walker ini juga berkaitan erat dengan konsep *amalgam state* seperti yang dikemukakan oleh Bryant. *Amalgam State* ini terkait dengan dua fungsi ambiguitas negara, apakah sebagai ‘*developer*’ atau ‘*destroyer*’ lingkungan. Bagaimana negara dapat menempatkan posisi mereka secara tepat salah satunya adalah dengan melakukan konservasi lingkungan.<sup>251</sup> Namun yang

---

<sup>250</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>251</sup> Dalam konteks ekologi politik konservasi dan preservasi dinilai sebagai salah satu instrumen dasar yang membedakan ekologi politik dari ranah ekonomi politik. Preservasi adalah tindakan perlindungan lingkungan di mana tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Sementara konservasi di sisi lain juga merupakan tindakan pemeliharaan lingkungan dengan adanya campur tangan manusia di dalamnya, melalui pengelolaan lingkungan. (Lihat James

terjadi di Nigeria, negara justru dapat dilihat menempatkan posisi mereka lebih sebagai ‘*destroyer*’ lingkungan daripada menjadi ‘*developer*’ lingkungan. Ada beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan posisi negara di bawah rezim militer ini sebagai ‘*destroyer*’ lingkungan.

Faktor yang *pertama* adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Johnston bahwa:<sup>252</sup>

“Peran negara yang terlalu menitikberatkan sebagai fasilitator dari sistem kapitalis yang berkaitan terhadap terjadinya masalah degradasi lingkungan yang nyata – nyata merupakan produk kapitalisme.”

Yaitu peran negara sebagai *rent seeking*, yang pada akhirnya menimbulkan hubungan saling ketergantungan dan menguntungkan antara Nigeria dan pihak *SPDC*. Kebijakan – kebijakan negara dalam hal lingkungan hidup seperti kebijakan *EIA (Environmental Impact Assessment)* yang harus dilakukan oleh setiap industri minyak di Nigeria jelas – jelas tidak pernah diimplementasikan dengan baik oleh *SPDC* sendiri. Badan regulator seperti *FEPA (Federal Environmental Protection Agency)* yang berwenang untuk melakukan penghentian kegiatan produksi minyak *SPDC* jika ternyata *SPDC* tidak memenuhi persyaratan *EIA*, tidak pernah terimplementasikan dengan baik. Begitu pula halnya dengan *DPR (Department Petroleum Resource)* yang memiliki fungsi sebagai pengawas khusus dalam standar aktivitas industri minyak, sama sekali juga tidak pernah menjalankan fungsinya dengan baik.

Keberadaan kedua badan tersebut seolah hanya sekedar formalitas belaka yang ingin mengesankan bahwa pemerintah juga memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan. Selain itu, fungsi maupun peran mereka sama sekali tidak berjalan dengan baik. Dalam industri minyak di Nigeria, badan – badan negara yang berfungsi sebagai fasilitator lebih banyak terlibat dan berperan jika dibandingkan dengan badan – badan regulator dan pemelihara lingkungan. Badan – badan usaha milik negara seperti *NNPC (Nigerian National Petroleum Company)* ataupun *NPDC (Nigerian Petroleum Development Company)* justru

---

Connely dan Graham Smith. *Politics and Environment: From Theory to Practice*, 2<sup>nd</sup> edition. (London: Routledge, 2003), hlm.15).

<sup>252</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 54.



memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan kedua badan di atas dalam aktivitas industri minyak di Nigeria, namun sayangnya tidak pernah menyentuh isu akan dampak lingkungan seputar aktivitas industri minyak.

Peraturan hukum lokal, seperti halnya prinsip dasar ekonomi, selalu digunakan untuk merasionalisasi berbagai praktek yang dilakukan oleh *SPDC*. Misalnya saja, tanggungjawab kepada negara ditunjukkan hanya dengan melakukan perbaikan dalam perjanjian yang hanya mengikuisertakan semua partai politik yang ada, sekaligus dengan adanya kerelaan perusahaan minyak tersebut untuk melakukan resolusi konflik dan perbaikan (dalam hal perjanjian), sementara di sisi lainnya pemimpin – pemimpin baru dalam komunitas masyarakat lokal justru menginginkan perubahan yang dilakukan tidak hanya sebatas formalitas belaka. Tanggungjawab yang telah dilakukan *SPDC* ini bagaimanapun telah mengabaikan hubungan kekuasaan secara implisit di dalam prosedur dan struktur institusional. Menurut *Human Right Watch*, kelemahan pemerintah Nigeria berhadapan dengan perusahaan minyak seperti *SPDC*, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut secara efektif mengontrol proses penilaian, negosiasi, dan pembayaran kompensasi<sup>253</sup>

Faktor yang *kedua* adalah rendahnya prioritas akan konservasi lingkungan di Nigeria. Seringkali, usaha negara untuk melakukan konservasi lingkungan yang selektif akan membawa negara berhadapan dengan pihak perusahaan multinasional seperti *SPDC*, yang pada faktanya banyak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di daerah – daerah produksi seperti Ogoni. Seperti yang dijelaskan oleh Bryant, bahwa daripada mengarahkan kebijakan kepada keterkaitan antara degradasi dan konservasi, negara lebih dilihat sebagai aktor yang jarang mengeluarkan satu suara. Konservasi lingkungan oleh negara jarang dilihat sebagai sebuah akhir, atau solusi dari degradasi lingkungan yang terjadi, tapi lebih dilihat sebagai sebuah akhir dari kepentingan politik dan ekonomi yang ada.<sup>254</sup>

Sementara Walker menambahkan, bahwa yang menjadi inti dari penjelasan mengapa negara menjadi perusak lingkungan adalah dengan

---

<sup>253</sup> Sharon M. Livesey, *op.cit.*, hlm.76.

<sup>254</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm.65.

mengetahui adanya sebuah paradoks akan fungsi dari negara itu sendiri.<sup>255</sup> Rendahnya prioritas konservasi di negara Dunia Ketiga seperti di Nigeria, sebenarnya merupakan gambaran dari keadaan sosial ekonomi di Nigeria sendiri. Untuk negara berkembang seperti Nigeria, kepentingan ekonomi politik masih menjadi prioritas utama dibandingkan memperhatikan permasalahan lingkungan. Padahal tanpa disadari, dampak lanjutan dari terjadinya degradasi lingkungan, terutama di Nigeria yang kebanyakan penduduknya masih tergantung kepada hasil alam (seperti Ogoni), adalah terjadinya *marginality* pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berbeda dengan konteks Negara Dunia Pertama seperti negara – negara di Eropa (yang secara sosial ekonomi sudah cukup mapan), mereka sudah memikirkan tahapan selanjutnya akan dampak yang terjadi akibat degradasi lingkungan. Tahapan yang selanjutnya sudah bukan lagi tertuju kepada kepentingan ekonomi semata, tapi sudah menuju kepada perhatiannya akan kesehatan misalnya, (sebagai dampak dari degradasi lingkungan) maupun *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) bagi generasi mendatang. Dengan dimilikinya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, secara sederhana akan dilihat oleh negara – negara Dunia Ketiga seperti Nigeria, sebagai modal mereka untuk melakukan percepatan aktivitas ekonomi politik. Hal ini berlanjut kepada ketergantungan mereka akan sumber daya minyak.

Kepentingan ekonomi politik pemerintah yang begitu besar terhadap minyak ini sekaligus menggambarkan adanya ketergantungan nasional yang begitu besar akan pemasukan dari industri minyak di Nigeria. Minyak sebagai sebuah sumber daya alam yang cukup bernilai, tak dipungkiri telah membawa banyak perubahan bagi perekonomian Nigeria. Jumlah pemasukan yang begitu besar dari sektor industri minyak ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Nigeria sendiri untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara mereka. Ketergantungan pemerintah Nigeria sendiri kepada industri minyak begitu besar, hingga bahkan dapat menggantikan produksi pertanian yang selama berpuluh – puluh tahun lamanya telah menjadi sumber pemasukan terbesar bagi negara.

---

<sup>255</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Seperti yang dikemukakan oleh Bryant, mengenai pandangannya akan negara dalam kajian politik di negara Dunia Ketiga, bahwa:<sup>256</sup>

“Dalam beberapa tingkatan yang lebih luas lagi, kebijakan irasional yang kerap kali dikeluarkan oleh pemerintah Negara – Negara Dunia Ketiga mungkin dapat merefleksikan kebutuhan ekonomi (kepentingan ekonomi). Banyak Negara Dunia Ketiga yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan produksi dan ekspor produk – produk primer. Banyak pemimpin di Negara – Negara Dunia Ketiga memiliki sedikit pilihan, karena itu mereka tetap melakukan kegiatan yang terus menerus berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dengan absennya sumber daya lain sebagai sumber pendapatan nasional.”

Berbagai strategi untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam minyak dilakukan oleh pemerintah, beberapa di antaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan kepemilikan lahan – lahan kaya minyak di Nigeria. Kebijakan – kebijakan seperti Dekrit No. 51 tahun 1969 (*Petroleum Act*), Dekrit No. 9 tahun 1970, maupun Dekrit tahun 1978 (*Land Use Act*), yang telah dikeluarkan pada masa pemerintahan rezim sebelumnya telah menjadi keuntungan tersendiri bagi rezim Abacha untuk terus mengadopsi kebijakan – kebijakan tersebut. Strategi eksplotasi ini kemudian semakin diperkuat dengan politik alokasi pendapatan (faktor alokasi finansial) dari sumber daya minyak yang juga merupakan warisan dari rezim – rezim terdahulu, yang dilengkapi dengan formula pembagian yang tidak seimbang antara pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, maupun pemerintah lokal, sebesar 50% , 30%, 15% dari total pendapatan yang ada. Sementara hanya 5% sisa dana yang dialokasikan sebagai dana khusus untuk penanggulangan teritori ibukota negara – negara bagian, masalah – masalah lingkungan, maupun pembangunan di daerah produksi minyak. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah strategi kebijakan untuk melegalisasi seluruh tindakan mereka dalam memperbesar kontrol pemerintah pusat (pemerintah federal) terhadap semua sumber daya ekonomi negara, terutama minyak. Hal ini juga sekaligus menggambarkan karakteristik kebanyakan pemerintahan militer yang cenderung sentralistik. Yaitu memusatkan seluruh potensi ekonomi maupun politik di tangan pemerintah pusat.

---

<sup>256</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Patut diketahui sebelumnya, bahwa kebanyakan sumber pemasukan industri minyak di Nigeria didapatkan dari aktivitas *rent seeking* (pajak, royalti, biaya sewa produksi minyak) daripada produksi minyak itu sendiri. Sementara pendapatan dari aktivitas ini juga merupakan ladang potensial bagi terjadinya korupsi. Inilah salah satu aktivitas yang juga merupakan salah satu faktor penyebab sering terjadinya kudeta militer di Nigeria. Industri minyak yang berkembang di Nigeria telah mengubah Nigeria menjadi sebuah negara rente (*rentier state*) di bawah pemerintahan rezim militer.<sup>257</sup> Di bawah rezim militer pula perusahaan – perusahaan multinasional yang menjadi kontraktor minyak di Nigeria mendapatkan jaminan lisensi untuk mengeksplorasi dan melakukan pengeboran di daerah sumber – sumber minyak di Nigeria dengan biaya mereka sendiri. Sebagai balasannya, perusahaan – perusahaan tersebut membayar biaya sewa bagi semua kilang minyak mereka di daerah Delta Niger.<sup>258</sup>

Fenomena seperti ini hampir sama seperti yang digambarkan oleh Lewis mengenai kecenderungan negara Dunia Ketiga, bahwa;<sup>259</sup>

“Di banyak bagian Negara Dunia Ketiga, rezim pencari rente (*rent seeking*), sekarang ini berada dalam kekuasaan, beberapa di antaranya begitu serakah yang mungkin dapat disebut sebagai ‘kleptocracies’. Dengan demikian karakteristik utama dari proses politik di banyak Negara Dunia Ketiga dapat digambarkan dengan adanya kedekatan dan hubungan saling menguntungkan antara negara dan para pemimpin bisnis.”

Korupsi yang terjadi di tengah – tengah para elit politik senior seringkali menjadi faktor selanjutnya yang menghalangi terjadinya keadilan dalam manajemen di Negara Dunia Ketiga. Alokasi pendapatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat selama kurun waktu 1993-1998 tidak dilakukan dengan semestinya. Pemerintahan Abacha, khususnya pemerintah pusat, dengan mudahnya menolak untuk melakukan alokasi pendapatan yang secara konstitusional ditujukan bagi semua negara bagian yang mengumpulkan pemasukan ke dalam rekening pemerintahan pusat untuk kemudian didistribusikan kembali ke dalam tiga level pemerintahan. Di bawah Abacha,

<sup>257</sup> Kalu N. Kalu, *op.cit.*, hlm.112.

<sup>258</sup> Olayemi Akinwumi, *op.cit.*, hlm.108.

<sup>259</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 62.

korupsi berkembang pesat hingga merampas aset kekayaan negara dalam jumlah besar. *NNPC* yang merupakan BUMN satu – satunya milik negara dalam industri minyak, kewenangannya berada langsung di bawah rezim militer. Semua instruksi dan keputusan yang diambil oleh *NNPC* berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Besarnya pendapatan dari aktivitas rent seeking ini juga dimanfaatkan oleh elit – elit militer untuk memperkaya diri mereka sendiri. Banyak elit – elit militer dalam kurun waktu 1993-1998 yang memperkaya diri mereka sendiri, melalui pendirian berbagai ladang minyak illegal. Bahkan Jendral Abacha sendiri sebagai pemimpin tertinggi rezim militer saat itu secara terang – terangan melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya aset kekayaan pribadinya, di samping kuatnya peran serta keluarganya dalam mengontrol perdagangan bahan bakar minyak dalam negeri. *Kleptocracies*, seperti yang digambarkan oleh Lewis telah menjadi sebuah fenomena yang ironis di Nigeria. Lebih dalam lagi, sejumlah aktivitas yang sarat akan kepentingan ekonomi politik ini telah membawa masalah yang cukup besar bagi terjadinya konflik ekologi politik di Nigeria, khususnya Ogoni.

Salah satu inti dari wacana politisasi lingkungan adalah pengaruh yang begitu besar dari kerjasama maupun kepentingan ekonomi politik yang dimiliki oleh negara dan pihak bisnis seperti *SPDC*. Tidak hanya pengaruhnya terhadap lingkungan, tapi juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat. Termasuk akan kemungkinan dilakukannya berbagai tindak kekerasan maupun tindakan represif kepada pihak – pihak yang menghalangi kepentingan mereka. Seperti halnya masyarakat di daerah produksi minyak seperti Ogoni yang terkadang dianggap sebagai penghambat kepentingan mereka. Selama kurun waktu 1993-1998 berbagai aksi kekerasan dan represif kerap mewarnai kehidupan masyarakat lokal Ogoni. Berbagai aksi dan tindakan represif yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Ogoni, maupun para aktivis *Movement for the Survival of the Ogoni Peoples (MOSOP)* semuanya tak lepas dari kerjasama antara rezim militer Abacha dan juga *SPDC*, yang dalam hal ini banyak mengalami kerugian akibat berbagai aksi dan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat Ogoni (*MOSOP*) di tingkat nasional maupun dalam level internasional. Berbagai tindakan represif

pemerintah, mulai dari penembakan masyarakat sipil, pembunuhan massal di desa – desa di Ogoni, kerusuhan antara masyarakat etnis Ogoni dan Andoni, hingga digantungnya sembilan aktivis *MOSOP* (termasuk Ken Saro – Wiwa), semuanya tak luput dari campur tangan pihak *SPDC* yang bekerja sama dengan rezim militer di bawah Abacha.

Dalam kasus penggantungan pembunuhan beberapa petinggi masyarakat Ogoni (yang menetapkan Saro-Wiwa dan beberapa aktivis *MOSOP* lainnya sebagai tersangka utama) misalnya, beberapa fakta baru terungkap berdasarkan hasil investigasi dari pihak NGO internasional pada tahun 1995. Dalam investigasi itu disebutkan bahwa sejumlah saksi mata pada kejadian tersebut menerima uang suap dari pihak *SPDC* untuk memutarbalikkan fakta yang terjadi guna memberatkan dakwaan terhadap Saro-Wiwa. Pernyataan tertulis itu ditandatangani oleh Charles Danwi yang merupakan salah satu dari dua orang saksi mata utama dalam pengadilan Saro-Wiwa. Dalam pernyataan tertulis (surat sumpah)nya tersebut ia mengatakan bahwa:<sup>260</sup>

“Untuk kesaksian yang ia berikan (dalam memberatkan Saro-Wiwa), ia akan diberi imbalan berupa sebuah rumah, sebuah kontrak dari *SPDC*, dan sejumlah uang sejumlah uang sebesar 30,000 Naira,...dalam pertemuan itu hadir pula beberapa pihak di antaranya; pasukan keamanan Rivers State, pejabat pemerintah, pihak keluarga Kobani, Orage, maupun Badey (yang merupakan pihak keluarga korban pembunuhan), serta dihadiri juga oleh perwakilan dari *SPDC*.”

Sebenarnya adanya indikasi keterlibatan *SPDC* dan militer untuk melakukan tuduhan rekayasa kepada Saro-Wiwa sendiri sudah dapat tercium dari perundingan rahasia yang dilakukan oleh Dr. Owen Wiwa dengan Brian Anderson (Pemimpin Eksekutif *SPDC* di Nigeria) pasca ditangkapnya Ken Saro-Wiwa dan kedelapan aktivis Ogoni lainnya akan dugaan kasus pembunuhan. Pada perundingan rahasia itu Brian Anderson mengajukan tawaran kepada Owen Wiwa untuk menghentikan semua aktivitas kampanye yang dilakukan *MOSOP* terutama

---

<sup>260</sup> M. Birnbaum, “Nigeria: Fundamental Rights Denied: Report of the Trial of Ken Saro-Wiwa and Others”, *ARTICLE 19* in Association with the Bar Human Rights Committee of England and Wales and the Law Society of England and Wales, June, 1995, Appendix 10: Summary of Affidavits Alleging Bribery.

dalam forum internasional yang selama ini mendeskreditkan pihak *SPDC* dan rezim militer Nigeria atas apa yang terjadi di Ogoni. Jika itu semua dilakukan, ia akan melepaskan Ken Saro-Wiwa dari tahanan. Selain itu *MOSOP* juga diharuskan untuk melakukan konferensi pers untuk menyatakan bahwa tidak ada pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh *SPDC* dan pihak militer Nigeria.<sup>261</sup> Namun demikian, Dr. Owen Wiwa menolaknya.

Sejumlah fakta mengenai keterkaitan antara *SPDC* dan pemerintah militer secara kasat mata sudah jelas terlihat, maupun berdasarkan pengakuan dari para pelaku. Letkol Okuntimo yang merupakan komandan utama dari Pasukan Keamanan Rivers State, menyatakan bahwa ia telah dibayar oleh *SPDC* untuk melakukan ‘pembersihan’ terhadap masyarakat Ogoni dan memfasilitasi keberlanjutan aktivitas mereka di lima ladang minyak di daerah Ogoni. Melalui wawancaranya dengan salah satu jurnalis *Sunday Times* satu bulan setelah peristiwa digantungnya Ken Saro-Wiwa, ia menyatakan bahwa selama ini ia dan pasukannya telah menerima pembayaran secara berkala dari *SPDC* atas semua tindakan ‘pengamanan’ yang telah mereka lakukan dari para demonstran Ogoni (yang dalam demonstrasinya tidak menggunakan kekerasan). Menurut Okuntimo, *SPDC* berkontribusi terhadap kondisi logistik melalui dukungan secara finansial. Untuk melakukan itu semua, mereka membutuhkan sumber daya, dan *SPDC* menyediakannya.<sup>262</sup>

Berdasarkan pengakuan Okuntimo, maupun sejumlah bukti terkait kasus – kasus kekerasan dan pembunuhan yang selama ini diterima oleh masyarakat Ogoni selama kurun waktu 1993-1998, semuanya tidak lepas dari campur tangan *SPDC* dan Pasukan Keamanan River State. Dalam menyikapi konflik yang terjadi seputar isu degradasi lingkungan oleh *SPDC*, Pasukan Keamanan River State (yang dibentuk atas instruksi dari Gubernur Rivers State, Letkol. Dauda Komo, yang merupakan tangan kanan Jendral Sani Abacha), justru malah berperan sebagai pasukan keamanan dari pihak *SPDC*, bukan sebagai aparat negara yang netral dan tidak memihak. Dengan mudahnya mereka menembakan peluru hingga menewaskan banyak masyarakat sipil Ogoni yang bahkan sama sekali tanpa

---

<sup>261</sup> Raymond L. Bryant, dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 132.

<sup>262</sup> Ike Okonta, dan Toronto Douglas, *op.cit.*, hlm. 135.

senjata. Hal ini merupakan contoh nyata peran otoritas negara yang menurut Johnston lebih sebagai fasilitator dari sistem kapitalis, walaupun dalam kacamata negara hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan nasional.

Melalui berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut, dapat terlihat adanya hubungan kekuasaan yang begitu kompleks dan saling ketergantungan antara pihak *SPDC* maupun pemerintah rezim militer. Barangkali hal ini yang dimaksud oleh Lewis sebagai karakteristik utama Negara Dunia Ketiga, yang digambarkan dengan adanya kedekatan dan hubungan saling menguntungkan antara negara dan pemimpin bisnis. Dalam mencapai kepentingan ekonomi politiknya, pemerintah Nigeria tidak segan – segan melakukan berbagai tindakan kepada siapapun yang dapat menghalangi kepentingan mereka. Sementara *SPDC* sendiri, agar dapat memperlancar kegiatan bisnisnya di Nigeria, mereka tidak segan – segan juga mengeluarkan banyak uang bagi rezim militer. Hal ini dilakukan tak lain juga demi mencapai kepentingan ekonomi mereka. Akibatnya adalah, posisi para otoritas negara tersebut yang tidak adil dan cenderung memihak. Termasuk di antaranya mengabaikan dampak degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh industri minyak seperti *SPDC*.

Tindakan yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu 1993 – 1998 sendiri sebenarnya secara tidak langsung telah menerjemahkan nilai sumber daya alam dengan beberapa faktor seperti: harga pasaran dunia produk itu, strategi yang dipakai untuk mengeksplotasinya, dan alokasi hasil keuntungan finansial dari dipakai atau tidaknya strategi tersebut. Dua terakhir itulah yang paling penting yang menimbulkan konflik negara versus masyarakat. Jika pandangan negara mengenai prosedur apa yang benar dan bobot dari distribusi kemanfaatan tidak memenuhi harapan masyarakat setempat, akibatnya adalah konflik, dalam hal ini adalah konflik ekologi politik. Salah satu alasan penting kenapa banyak pemerintah di Negara Dunia Ketiga, seperti di Nigeria, gagal untuk melakukan penjagaan terhadap lingkungan lebih daripada semua hal yang dapat digambarkan secara teoritis adalah tidak lain dikarenakan kepentingan ekonomi politik.



#### 4.2.2. Kepentingan Masyarakat Ogoni dalam Konflik Ekologi Politik di Ogoni (Tinjauan Analisis *Grassroots Actors* dalam Kajian Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga)

Kemunculan *MOSOP* sebagai organisasi masyarakat lokal (*grassroots organization*), telah menjadi sebuah fenomena umum yang kerap terjadi di bawah pemerintahan rezim otoritarian seperti yang terjadi di Nigeria (di bawah rezim militer). Seperti yang dikemukakan oleh Price, Eccleston dan juga Potter melalui penelitian mereka masing – masing bahwa rezim otoritarian seringkali (atau juga dengan secara tidak sengaja) mendorong kemunculan *grassroots organizations* di Negara – Negara Dunia Ketiga.<sup>263</sup> Kemunculan *MOSOP* tentunya diiringi dengan alasan yang kuat, bahwa selama ini dalam hubungan kekuasaan yang terjadi, seringkali mereka dilemahkan secara struktural oleh pemerintah.

Dalam konflik ekologi politik yang terjadi di Ogoni selama kurun waktu 1993-1998, dapat dikatakan masyarakat Ogonilah yang selama ini paling banyak mendapatkan kerugian dan penderitaan akibat adanya hubungan yang tidak seimbang yang kerap terjadi di Negara Dunia Ketiga. Ogoni, sebagai salah satu etnis minoritas dari sekian ratus etnis lainnya di Nigeria, seolah menjadi sebuah entitas kecil yang terlupakan oleh pemerintah. Memang, kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Ogoni tidak semata – mata disebabkan dari hadirnya *SPDC* di tanah mereka, jauh sebelum itu, baik secara langsung maupun tidak, mereka telah dimiskinkan secara struktural. Yaitu akibat ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Nigeria sendiri.

Walaupun demikian, selama kurun waktu tersebut masyarakat Ogoni masih dapat bertahan dan hidup dengan baik, walaupun standar rata – rata kehidupan mereka masih di bawah standar nasional. Keadaan masyarakat semakin sulit dan bahkan berubah secara drastis semenjak terjadinya degradasi lingkungan di tanah mereka akibat aktivitas industri minyak. Eksploitasi maupun eksplorasi minyak telah membuat tanah mereka yang jadinya subur menjadi gersang dan mandul. Air sungai menjadi tercemar, hingga udara yang mereka hirup pun telah tercemar oleh polusi. Kondisi yang seperti ini telah membawa kehidupan masyarakat Ogoni dari yang tadinya sudah termarjinalkan, menjadi semakin

---

<sup>263</sup> Raymond L. Bryant, dan Bailey, *op.cit.*, hlm.173.

termarginalkan. Perubahan lingkungan yang terjadi secara drastis di tanah mereka kali ini, membuat mereka tidak dapat dengan mudah bertahan seperti dulu. Hal ini dikarenakan sumber mata pencaharian masyarakat lokal Ogoni yang kebanyakan bergantung kepada alam. Menurut Elliot, bagi para masyarakat adat yang telah lama tinggal di daerah tertentu, hal tersebut merupakan sebuah bentuk keberlanjutan mereka dalam jangka pendek (yang merupakan fokus utama mereka) dan untuk ini mereka sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam sekitar.<sup>264</sup>

Di sisi lain, bagi masyarakat lokal seperti Ogoni, lingkungan tidak mereka lihat hanya berdasarkan kepentingan material belaka. Bagi mereka, alam dan masyarakat merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tidak hanya minyak bumi, tapi juga tanah Ogoni sendiri yang cukup subur, maupun sungai – sungai dan hutan di Ogoni sendiri yang kaya akan keanekaragaman hayati telah membuat masyarakat lokal menjadi salah satu etnis yang handal dan produktif dalam sektor pertanian dan perikanan, sambil tetap berusaha menjaga keseimbangan dengan lingkungan mereka. Mungkin inilah yang dinamakan kearifan lokal setempat.

Melalui cara pandang mereka, perubahan lingkungan yang terjadi lebih mereka lihat sebagai musnahnya mata pencaharian mereka (sumber kehidupan) sekaligus hilangnya sumber identitas budaya mereka (kearifan lokal). Lingkungan dan alam yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian mereka, juga dipandang sebagai sebuah tanggung jawab atau titipan dari Tuhan untuk diwariskan kepada anak cucu mereka nantinya. Untuk itu kepentingan masyarakat Ogoni yang diorganisir oleh *MOSOP* tidak sepenuhnya hanya terfokus bagi kepentingan ekonomi saja, tapi juga terfokus pada kepentingan akan lingkungan itu sendiri. Itu semua tercantum dalam poin – poin *Ogoni Bill of Rights* yang menjadi landasan utama tuntutan masyarakat Ogoni. Poin – poin tersebut di antaranya:<sup>265</sup>

1. Otonomi politik masyarakat Ogoni;

---

<sup>264</sup> *Ibid*, hlm 159

<sup>265</sup> Olayemi Akinwumi, *Loc.Cit.*, hlm. 163

2. Hak untuk melakukan kontrol dan menggunakan pendapatan dari pembagian pendapatan (yang merugikan masyarakat) yang berasal dari sumber daya alam Ogoni bagi pembangunan di wilayah Ogoni;
3. Hak akan perwakilan secara langsung dan memadai di semua institusi nasional di Nigeria;
4. Penggunaan dan pelestarian bahasa – bahasa Ogoni di wilayah Ogoni;
5. Pembangunan menyeluruh dalam kebudayaan Ogoni;
6. Hak akan kebebasan beragama;
7. Hak untuk perlindungan akan lingkungan dan ekologi di Ogoni dari degradasi lingkungan maupun untuk generasi mendatang.

Poin ketujuh dalam *Ogoni Bill of Rights*, secara eksplisit menyiratkan kepentingan mereka akan proses konservasi lingkungan yang secara bertentangan justru berada dalam urutan terbawah dalam prioritas pemerintah Nigeria. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam tuntutan – tuntutan *MOSOP* ini juga tidak lepas dari pengaruh Ken Saro-Wiwa sendiri yang juga merupakan seorang aktivis. Melalui pengaruh dan penyadaran yang diberikan oleh Ken Saro-Wiwa, konsep kearifan lokal yang selama ini dimiliki oleh masyarakat Ogoni, diterjemahkan dalam bingkai masyarakat modern menjadi sebuah tuntutan akan adanya konservasi lingkungan di tanah Ogoni. Perlindungan akan lingkungan ini, juga sejalan dengan langkah untuk mempertahankan identitas cultural masyarakat yang tercantum dalam poin keempat dan kelima.

Di sisi lain, *MOSOP* juga menyadari, bahwa ketidakadilan secara struktural yang mereka terima secara ini juga diakibatkan tidak adanya perwakilan dari pihak masyarakat Ogoni yang cukup memadai di dalam arena politik lokal dan nasional. Hingga akhirnya tidak pernah ada orang yang menyuarakan kepentingan mereka dalam tataran nasional. Untuk itulah *MOSOP* menempatkan poin kepentingan politik masyarakat lokal di poin pertama hingga ketiga. Dengan demikian *Ogoni Bill of Rights* yang menjadi dasar utama tuntutan masyarakat Ogoni terhadap pemerintah tidak hanya sarat akan kepentingan ekonomi politik semata, tapi juga sarat akan kepentingan ekologi politik.

Selain (secara tidak sengaja) mendorong lahirnya *grassroots organization*, seperti *MOSOP*, rezim otokratik di Nigeria juga semakin mendorong *grassroots*

*organization* seperti *MOSOP* untuk menjadi semakin mandiri dan independen dalam bergerak dan menyuarakan kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh Peet dan Watts, bahwa keadaan yang demikian (keberadaan rezim otoritarian) juga semakin mendorong terbentuknya *grassroots organizations* yang bersifat independen dan mandiri (*self-help*) di Negara – Negara Dunia Ketiga Tersebut. Berkembangnya kemampuan untuk dari organisasi – organisasi ini untuk menempatkan dan menyuarakan kepentingan sosial lokal dan permasalahan lingkungan tanpa dukungan utama yang berasal dari negara tampak merefleksikan adanya perubahan yang besar dalam hubungan negara-masyarakat sipil di Negara Dunia Ketiga.<sup>266</sup>

Karakteristik *self-help* ini diadopsi oleh *MOSOP* menjadi sebuah strategi tersendiri dalam gerakan yang mereka lakukan. *MOSOP* menyadari, bahwa gerak dan langkah perjuangan mereka dalam skala nasional akan menjadi sangat terbatas karena adanya kemungkinan berbagai tindakan dari negara yang akan menghambat mereka menyuarakan kepentingannya. Selain itu, hal ini juga bisa diakibatkan karena keseluruhan struktur otoritas negara yang secara jelas berada di bawah satu arahan dan kepentingan. Yaitu kepentingan dari rezim militer yang berkuasa. Sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan di negara mereka sendiri jika hanya mengandalkan keadilan dari pemerintah. Untuk itu, melalui koneksi serta jaringan yang dimiliki oleh Ken Saro-Wiwa, *MOSOP* menyuarakan kepentingan dan kondisi yang mereka alami di dalam ranah internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Friedman dan Rangan mengenai ciri – ciri *grassroots organizations* di Negara Dunia Ketiga:<sup>267</sup>

“Ketergantungan terhadap aktor – aktor luar akan menjadi ciri – ciri umum selanjutnya bagi kebanyakan *grassroot organization* di Negara Dunia Ketiga. Lebih dalam lagi, tema yang menonjol dalam kerangka kerja para ilmuwan ekologi politik mengenai *grassroot organisation* adalah mengenai fakta bahwa aktor – aktor eksternal seringkali memainkan peranan penting dalam pembangunan *grassroot organization* tersebut.”

---

<sup>266</sup> Raymond L. Bryant, dan Sinead Bailey, *op.cit.*

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

Melalui kampanyenya, Ken Saro-Wiwa melakukan menyuarakan kondisi dan kepentingan masyarakat Ogoni di berbagai forum internasional. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 tahun semenjak awal berdirinya (tahun 1990), *MOSOP* telah berhasil meraih dukungan dari berbagai macam Organisasi – Organisasi Internasional Non – Pemerintah, mulai dari keanggotaan mereka di *UNPO*, pidato – pidato aktivis *MOSOP* di forum – forum internasional, adanya dukungan dari organisasi lingkungan internasional seperti *GreenPeace*, *The Body Shop*, bahkan *Amnesty International*. Dukungan yang datang dari berbagai pihak internasional ini tidak hanya berbentuk advokasi, tapi juga berupa publikasi atas apa yang terjadi di Ogoni ke dunia internasional.

Cara yang dilakukan oleh *MOSOP* ini terbukti cukup efektif membawa masyarakat Ogoni dalam memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah Nigeria sendiri maupun *SPDC*. Adanya kecaman dan bantuan berupa investigasi dari pihak internasional telah membawa langkah perjuangan masyarakat lokal Ogoni menjadi selangkah lebih maju. Dari yang tadinya hanya sebuah gerakan masyarakat lokal yang terdiri dari salah satu etnis minoritas di Nigeria, menjadi sebuah gerakan masyarakat lokal yang menyita banyak perhatian sekaligus pukulan atas ketidakadilan yang selama ini dilakukan oleh negara. Pemerintah Nigeria kala itu mendapatkan sorotan yang begitu besar dari pihak – pihak internasional.

Begitu besarnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pihak internasional seperti *UNPO* maupun *Greenpeace* kepada *MOSOP*, di sisi lain justru malah membuat pemerintah Nigeria semakin reaktif dan keras. Perkiraan akan adanya proses diplomasi yang kemungkinan akan terjadi antara pemerintah dan masyarakat Ogoni atas tekanan internasional, hanya dilakukan di awal. Namun selanjutnya berbagai aksi dan demonstrasi anti kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Ogoni selama kurun waktu tersebut ditanggapi dengan aksi represif oleh aparat negara, bahkan menjurus kepada tindakan pelanggaran HAM. Walaupun secara internasional, masyarakat Ogoni mendapatkan dukungan yang begitu besar dan luas, namun ketika kembali ke arena lokal (internal Nigeria), semua yang dilakukan *MOSOP* tidak membawa perubahan yang signifikan pada langkah positif yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah. Kecaman maupun

ancaman dari dunia internasional tidak membuat pemerintah Nigeria bergeming. Yang terjadi justru tindakan represi dan kekerasan yang semakin sering terjadi, termasuk merancang berbagai strategi dan skenario bersama *SPDC* untuk melakukan ‘pembersihan’ masyarakat Ogoni di bawah komando Letkol. Paul Okuntimo.

Karakteristik *self-help* yang dikembangkan oleh *MOSOP* juga tak lepas dari peran dan kontribusi Ken Saro-Wiwa. Sebagai juru bicara dan (kemudian) menjadi presiden *MOSOP*, Ken Saro-Wiwa telah menjadi sebuah figur penting dalam sejarah perjuangan masyarakat lokal Ogoni sepanjang tahun 1990-an. Seperti yang dikemukakan oleh Bryant:<sup>268</sup>

“Bahwa walaupun banyak *grassroots organizations* mengadopsi struktur demokratis di dalam organisasinya, hal ini tidak berarti bahwa pemimpin terkemuka (secara individu) ataupun ‘*opinion-formers*’ tidak memainkan peranan penting dalam perkembangan aktivitas *grassroot organizations* ini. .... Namun beberapa *grassroots organizations* lain yang berkembang mulai dari dasar, yang didominasi oleh campur tangan penuh oleh sejumlah pemimpin aktivis di awal permulaannya, telah membentuk sejumlah besar kesatuan yang menciptakan sebuah komite pimpinan, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para konstituen mereka.”

Keberadaan Saro-Wiwa yang begitu penting dan dihormati, sekaligus merupakan kelemahan tersendiri bagi gerakan masyarakat Ogoni ini ke depannya. Terutama setelah pasca digantungnya Saro-Wiwa dan kedelapan aktivis *MOSOP* lainnya. Gerakan masyarakat Ogoni seolah tanpa arah. Apa yang dilakukan oleh Ken Saro-Wiwa pada waktu – waktu sebelumnya, tidak dapat diteruskan dengan baik oleh aktivis *MOSOP* lainnya. Pola perjuangan yang anti kekerasan semakin terkikis, dengan beralihnya pola perjuangan beberapa masyarakat Ogoni menjadi militan dan terkadang disertai kekerasan.

Pemerintah Nigeria sendiri menyadari sepenuhnya akan peran dan pengaruh Saro-Wiwa baik pada pergerakan masyarakat Ogoni sendiri maupun dalam dunia internasional, di mana ia memiliki banyak jaringan dan dukungan. Sehingga wajar jika Saro-Wiwa dijadikan target utama dalam operasi ‘pembersihan’ masyarakat Ogoni yang dipimpin oleh Letkol. Okuntimo. Dengan

---

<sup>268</sup> *Ibid.*

digantungnya Saro-Wiwa, pemerintah terbukti berhasil untuk sedikit meredam gerakan maupun resistensi dari masyarakat Ogoni. Di sisi lain kekhawatiran pemerintah akan sosok Saro-Wiwa juga didasari atas kekhawatiran meluasnya semangat dan pengaruh Saro-Wiwa bagi etnis – etnis lain yang juga tinggal di daerah produksi minyak lainnya di Niger Delta. Jika *grassroots organization* seperti *MOSOP* banyak bermunculan di Delta Niger, otomatis akan berpengaruh pada kondisi keamanan nasional Nigeria (yang selama ini menjadi alasan utama pemerintah Nigeria terhadap tindakan kekerasan dan represi yang mereka lakukan pada masyarakat).

Tak dapat dipungkiri, *MOSOP* dan pemikiran Saro-Wiwa telah berpengaruh bagi bermunculannya *grassroots organizations* lain di Delta Niger. Banyak *grassroots organizations* yang kemudian muncul mengakui bahwa mereka secara tidak langsung terpengaruh oleh pemikiran Ken Saro-Wiwa dan gerakan yang dilakukan *MOSOP*. Pada tahun 1997 misalnya, di desa Aleibiri, negara bagian Bayelsa State, telah berkumpul lebih dari seribu orang pemuda yang terdiri dari 28 etnis yang bermukim di Delta Niger. Berkumpulnya mereka di Aleibiri tak lain untuk mendeklarasikan kelompok penekan baru yang juga anti akan kegiatan dan dampak dari aktivitas industri minyak, yang bernama *Chikoko Movement*.<sup>269</sup> Bahkan dua tahun setelah berdirinya *MOSOP*, etnis Ijo yang juga bermukim di daerah Delta Niger juga membentuk *grassroots organization* serupa *MOSOP* yang bernama *Movement of the Survival of the Izon Ethnic Nationally (MOSIEND)*.<sup>270</sup>

Adanya *marginality, scarcity* maupun *vulnerability*, yang selama ini telah dialami oleh masyarakat Ogoni selama bertahun – tahun telah membuat mereka menjadi rentan akan segala tindakan yang dilakukan oleh negara. Hubungan antara masyarakat lokal dan negara yang selama ini selalu memosisikan masyarakat sebagai subordinat telah membuat kondisi masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan, dan bahkan tidak mempunyai pilihan lain. Masyarakat harus memilih sikap antara resistensi ataupun justru bergabung dengan negara demi keberlangsungan hidup mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Blaikie dan

---

<sup>269</sup> Ike Okonta dan Oronto Douglas, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>270</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

Brookfield dalam pandangan mereka akan sikap yang cenderung dilakukan oleh *grassroot actor* di Negara Dunia Ketiga, “*if you can't beat them, you join them*”.

<sup>271</sup> Hal demikian tak luput pula dilakukan oleh beberapa kalangan tertentu di dalam kalangan masyarakat Ogoni. Beberapa petinggi tradisional masyarakat Ogoni ada yang bekerjasama dengan negara maupun *SPDC* dalam melakukan pengrusakan lingkungan di Ogoni, dengan melakukan keberpihakan atas semua yang dilakukan *SPDC* di Ogoni. Di sisi lain, keberpihakan mereka ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mereka akan meluasnya pemikiran dan gerakan masyarakat Ogoni yang dikomandoi oleh Saro-Wiwa, yang dapat mempengaruhi kekuasaan politik lokal mereka yang telah bertahun – tahun diturunkan kepada mereka. Beberapa nama seperti Dr. Garrick Laton, maupun Edward Kobani yang tadinya merupakan presiden dan wakil presiden *MOSOP*, dalam perkembangannya juga berbalik memihak negara dan *SPDC*.

Berbagai langkah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh *MOSOP* menggambarkan adanya berbagai macam kepentingan di dalamnya, tidak hanya seputar ekonomi politik tapi juga menyangkut kepentingan ekologi politik. Walaupun beberapa ilmuwan ekologi politik menyebutkan bahwa keberlangsungan lingkungan yang dituntut oleh *grassroots organizations* di Negara Dunia Ketiga, lebih memberikan perhatian akan ketergantungan mata pencaharian para aktornya, namun hal ini telah menjadi suatu yang wajar, mengingat keadaan sosial ekonomi Nigeria yang belum begitu maju. Ketergantungan yang begitu besar akan lingkungan tempat mereka tinggal bagaimanapun telah menjadi salah satu ciri yang umum yang terjadi di berbagai masyarakat Negara Dunia Ketiga. Bagi masyarakat lokal seperti Ogoni, lingkungan dipandang sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Tidak hanya sekedar sebagai sumber mata pencaharian, namun juga merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga, demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang.

---

<sup>271</sup> Raymond L. Bryant, dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 167.



#### **4.3. Konflik Kepentingan Antara Negara versus Masyarakat Ogoni (Tinjauan Analisis Teori Konflik Sosial yang Berkepanjangan).**

Untuk menggambarkan mengenai konflik kepentingan yang terjadi di Ogoni antara negara versus masyarakat Ogoni, penulis akan melakukan analisis menggunakan *Protracted Social Conflict (PSC)* -teori konflik sosial yang berkepanjangan– dari Edward Azar. Digunakannya teori konflik sosial yang berkepanjangan ini semata – mata digunakan penulis juga untuk menjelaskan konflik ekologi politik di Ogoni yang tidak terselesaikan (cenderung berlarut – larut). Dengan menggunakan teori ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai kepentingan negara maupun masyarakat Ogoni secara umum sesuai dengan aksi dan reaksi yang terjadi dalam konflik yang justru semakin berkepanjangan.

*PSC* sendiri menurut Edward Azar memiliki pengertian bahwa konflik itu merepresentasikan perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik, maupun dalam partisipasi ekonomi dan sumber daya alam. Peran negara dalam *PSC* merupakan hal yang sangat penting, apakah negara dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal, maupun dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik. Istilah *PSC* sendiri menurut Azar menekankan bahwa sumber – sumber konflik terutama terletak di dalam negara dan bukannya antara negara. Dalam menjelaskan kecenderungan akan konflik sosial yang berlarut – larut, Azar mengidentifikasikannya melalui empat variabel yang merupakan prakondisi bagi transformasi aktor – aktor di dalamnya ke tingkatan intensitas yang lebih tinggi.

*Pertama*, adanya kandungan komunal di dalam *PSC*, yang menurut Azar merupakan sebuah penekanan, bahwa inti dari analisa *PSC* adalah hubungan antara kelompok identitas dan negara. Yang dalam kasus ekologi politik ini digambarkan melalui hubungan antara etnis minoritas Ogoni dan negara. Identitas masyarakat Ogoni sebagai salah satu etnis minoritas dari ratusan etnis yang terdapat di Nigeria barangkali telah menempatkan masyarakat Ogoni berada pada kondisi hubungan yang tidak seimbang dan berseberangan dengan negara. Seringkali kebutuhan dan kepentingan etnis minoritas seperti Ogoni tidak menjadi

prioritas utama, dan bahkan cenderung dilupakan oleh negara. Dalam kaitannya dengan konflik ekologi politik yang terjadi adalah diabaikannya kepentingan masyarakat akan keadilan lingkungan dan sumber daya alam di daerah mereka yang selama ini telah mengalami degradasi, hingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi mereka. Dengan dibentuknya *Ogoni Bill of Rights*, masyarakat Ogoni seolah – olah hendak mengingatkan pemerintah bahwa mereka, etnis lokal Ogoni, walaupun memiliki jumlah yang minoritas, tetap memiliki kekuatan dan hak untuk mendapatkan apa – apa yang memang menjadi hak mereka, dari negara. Apa yang terkandung di dalam *Ogoni Bill of Rights* sekaligus menunjukkan bahwa selama ini otoritas negara telah mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak – hak dasar masyarakat Ogoni.

Keikutsertaan Ogoni (yang direpresentasikan oleh Ken Saro-Wiwa) dalam organisasi internasional seperti *UNPO (Unrepresented Nation People Organization)*, - yang memberikan perlindungan bagi etnis – etnis yang tidak terwakili, tidak diakui pemerintah, atau tertindas di berbagai belahan dunia – secara nyata memiliki kandungan komunal di dalamnya. Hal ini justru menggambarkan adanya ketidakadilan dan pengakuan yang layak dari pemerintah Nigeria selama ini akan hak – hak dari etnis minoritas seperti Ogoni. Dengan keikutsertaan mereka dalam *UNPO*, masyarakat Ogoni berharap agar *UNPO* dapat memfasilitasi ataupun memberi dukungan bagi mereka untuk mendapatkan hak – hak mereka secara layak dan adil dari pemerintah Nigeria, walaupun mereka hanyalah salah satu etnis minoritas di Nigeria.

Dikedepankannya faktor identitas mereka sebagai masyarakat Ogoni dalam konflik ekologi politik yang terjadi ini sekaligus mengisyaratkan adanya jurang pemisah yang begitu lebar antara etnis – etnis yang ada di Nigeria. Terutama antara etnis mayoritas yang kebanyakan menduduki pemerintahan (termasuk rezim militer) dengan masyarakat etnis minoritas seperti Ogoni, dan etnis minoritas lainnya di Nigeria. Besarnya kesenjangan antara etnis minoritas dan mayoritas di Nigeria juga tak lain merupakan akibat dari warisan kolonial yang sebelumnya menduduki Nigeria. Dalam pandangannya, Azar menghubungkan disjungsi antara negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia dengan sebuah warisan kolonial yang secara artifisial meletakkan gagasan

Eropa tentang territorial kenegaraan ke dalam “keragaman kelompok komunal” di atas prinsip “memecah belah dan menguasai”.

Sebagai akibatnya, dalam banyak masyarakat multi komunal pasca kolonial mesin negara menjadi didominasi oleh kelompok tunggal atau koalisi dari segelintir kelompok komunal yang tidak merespon kebutuhan lainnya dalam masyarakat, yang menegangkan struktur sosial dan pada akhirnya melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut – larut.<sup>272</sup> Fragmentasi yang lahir antara etnis minoritas seperti Ogoni terhadap pemerintah sekaligus juga merupakan dampak akibat kepentingan ekonomi politik pemerintah sendiri. Kepentingan pemerintah tersebut secara langsung maupun tidak, telah mendominasi dan menenggelamkan kepentingan – kepentingan masyarakat etnis minoritas seperti Ogoni akan perlindungan lingkungan dan keadilan. Akibatnya, tidak hanya fragmentasi, tapi juga konflik yang berkepanjangan antara negara versus masyarakat Ogoni.

*Kedua*, adanya perampasan kebutuhan manusia, yang menjadi sumber PSC yang tersembunyi. Hal ini tergambar jelas melalui degradasi lingkungan yang terjadi (sebagai dampak aktivitas industri minyak) di tanah Ogoni, yang secara tidak langsung merupakan bentuk perampasan sumber daya alam oleh negara. Bagi masyarakat lokal Ogoni yang kebutuhan dasarnya masih sangat tergantung pada lingkungan sekitar mereka, adanya degradasi lingkungan yang seolah – oleh dilegalkan oleh pemerintah, sama saja dengan dirampasnya kebutuhan mereka untuk hidup dan bertahan. Sementara di sisi lain, sumber daya alam berupa minyak yang oleh pemerintah dianggap sebagai sumber ekonomi, justru berakibat buruk bagi masyarakat. Masyarakat tidak pernah mendapatkan keuntungan yang signifikan dari keberadaan industri minyak di tanah mereka. Kesejahteraan dan pembangunan di sekitar tanah Ogoni justru semakin mengalami kemerosotan.

Selain melalui dampak degradasi lingkungan yang terjadi di Ogoni, keberadaan rezim militer yang korup, maupun alokasi dana yang tidak memadai, juga merupakan bentuk lain dari perampasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat. Alokasi dana sebesar 5% dari total pendapatan yang didapat dari

---

<sup>272</sup> Hugh Miall, *op.cit.*, hlm.113-114.

industri minyak yang seharusnya diperuntukkan bagi pemeliharaan lingkungan maupun keberlangsungan pembangunan daerah – daerah industri minyak, secara sewenang – wenang telah diselewengkan oleh pemerintah. Bahkan di bawah rezim Abacha sendiri selama kurun waktu 1993-1998, semua pendapatan yang dihasilkan dari industri minyak tidak dialokasikan ke tiga level pemerintahan sesuai dengan besaran dana alokasi yang tertera dalam konstitusi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria, untuk merampas sumber daya Ogoni dan melegalisasi sejumlah pencurian melalui dekrit yang dikeluarkan oleh rezim militer merupakan sebuah bentuk perampokan yang dilakukan oleh aparat negara.

*Ketiga*, adanya kecenderungan yang oleh Azar dicirikan melalui peran pemerintah yang rapuh, tidak mampu, picik, dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karakteristik negara seperti itu cenderung terkonsentrasi di dalam negara – negara Dunia Ketiga yang secara tipikal dicirikan oleh beberapa hal seperti; pertumbuhan penduduk yang cepat, sumber – sumber pokok yang terbatas dan juga mengandung “kapasitas politik” yang terbatas yang seringkali dihubungkan dengan warisan kolonial berupa institusi partisipasi yang lemah, sebuah tradisi hierarki untuk melaksanakan aturan birokrasi dari pusat metropolitan, dan juga adanya warisan instrumen untuk melakukan tekanan – tekanan politik.

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat terjadi di Negara – Negara Dunia Ketiga seperti Nigeria, pada kenyataannya seringkali berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber – sumber pokok masyarakat yang terbatas. Begitu pula halnya yang terjadi pada konflik ekologi politik di Ogoni. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan secara langsung berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat Ogoni, dan juga merupakan alasan utama kenapa masyarakat lokal mengedepankan wacana perlindungan lingkungan. Dengan semakin berkurangnya sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, otomatis mau tidak mau akan membuat mereka beralih haluan dalam mencari sumber mata pencaharian yang lainnya. Namun hal demikian tidak dengan mudah dapat dilakukan oleh masyarakat Ogoni. Keterbatasan mereka dalam hal pendidikan, dan keterbelakangan yang selama ini mereka terima membuat mereka tidak memiliki

alternatif lain sebagai sumber mata pencaharian. Sementara pemerintah sendiri sebagai otoritas yang berwenang tidak menyediakan sumber – sumber pokok pengganti bagi masyarakat lokal tersebut untuk dapat terus bertahan hidup. Padahal pemerintahlah yang memiliki andil bagi hilangnya sumber mata pencaharian mereka selama ini.

Berbagai strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung tidak berdasarkan dan menyiratkan kepentingan mereka yang begitu besar terhadap eksploitasi minyak. Undang – undang penggunaan lahan di Nigeria (*Nigerian Land Use act*) yang merupakan warisan dari rezim militer sebelumnya, memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam hak kepemilikan lahan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Begitu pula halnya dengan Dekrit Petroleum (*Petroleum Decree*), yang mengalami amandemen pada masa pemerintahan Abacha, pada tahun 1996, juga mengabaikan mekanisme komunikasi dan partisipasi dari masyarakat lokal Delta Niger dalam hal eksploitasi sumber daya alam (hak masyarakat lokal), dan sebaliknya, justru memberikan hak tersebut hanya kepada perusahaan – perusahaan asing yang berkolaborasi dengan pemerintah Nigeria. Apa yang tercantum dalam *Petroleum Decree* 1969/1996 dan *Land Use act* 1978 secara garis besar dapat dikatakan menghilangkan hak masyarakat Ogoni maupun Delta Niger lainnya akan sumber daya alam dan juga dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Lemahnya institusi partisipasi masyarakat seperti yang dialami merupakan salah satu ciri dari prakondisi yang menurut Azar potensial bagi berkembangnya *PSC*.

Kapasitas politik yang lemah seperti yang dikemukakan oleh Azar ini juga yang menjadi salah satu dasar tuntutan masyarakat Ogoni dalam *Ogoni Bill of Rights*. Ketiadaan perwakilan masyarakat Ogoni secara politik dalam institusi – institusi pemerintah di tingkat pusat telah menyebabkan keadaan masyarakat Ogoni selama ini begitu jauh dari jangkauan dan perhatian pemerintah pusat. Tuntutan akan otonomi politik, maupun keterwakilan masyarakat Ogoni di dalam institusi – institusi negara, juga didasarkan kekecewaan masyarakat akan sistem politik otoritarian yang tertutup dan terpusat, sehingga menutup jalan bagi masyarakat untuk menyuarkan kepentingan mereka kepada pemerintah. Pemerintahan yang cenderung otoriter ini juga tidak bisa dilepaskan dari

karakteristik utama berupa sifat sentralistis dari rezim militer yang selama ini memerintah Nigeria. Ditambah lagi selama kurun waktu 1993-1998, karakteristik otoritarian ini semakin menguat di bawah pemerintahan Abacha yang bertangan besi.

Menurut Azar, karakteristik sentralistis seperti yang dimiliki oleh rezim militer Nigeria ini tak lain juga merupakan pengaruh dari situasi pada zaman kolonial di Nigeria, yang sekaligus berdampak pada digunakannya instrumen tertentu untuk melakukan tekanan – tekanan politik. Oleh pemerintah rezim militer Nigeria, tekanan – tekanan politik tersebut tidak hanya dilakukan melalui pencekalan ataupun sekedar melakukan tekanan berupa ancaman saja, tapi juga melalui berbagai aksi represi dan kekerasan yang berulang kali dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Ogoni. Sehingga wajar saja jika konflik yang terjadi semakin tidak terselesaikan.

Dasar akan keamanan nasional, yang selama ini menjadi alasan mereka untuk melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat, justru akan membuat masyarakat semakin resisten dan bahkan mungkin menjadi semakin progresif. Hal ini tidak dapat dibenarkan, mengingat kondisi masyarakat Ogoni yang merupakan pihak sipil yang tidak dilengkapi persenjataan sama sekali, bahkan dalam setiap aksi demonstrasi yang mereka lakukan, sikap anti kekerasan selalu mereka tunjukkan. Bagaimanapun, walau dalam kondisi kekuatan ekonomi, politik yang tidak seimbang seperti yang terjadi antara masyarakat Ogoni dan negara, kekerasan ataupun represi bukanlah solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Momentum aksi damai pada awal tahun 1993 dan juga pembunuhan terhadap salah satu masyarakat Ogoni oleh pihak militer, telah menjadi sumber akselerasi konflik di Ogoni. Begitu pula halnya dengan momentum digantungnya sembilan orang aktivis *MOSOP* (termasuk oleh Ken Saro – Wiwa) yang menyebabkan eskalasi konflik, karena menjadi sumber inspirasi bagi etnis – etnis lain di daerah Delta Niger untuk mendirikan berbagai *grassroots organizations* di daerah mereka masing – masing. Eskalasi dan akselerasi konflik yang menyebabkan konflik menjadi berkepanjangan inilah yang menjadi salah satu

prakondisi yang oleh Azar dikaitkan dengan ciri pemerintahan yang cenderung otoriter.

*Keempat*, adanya keterkaitan internasional, khususnya dalam hubungan politik ekonomi dari dependensi ekonomi di dalam sistem ekonomi internasional, dan jaringan hubungan politik militer yang merupakan pola – pola regional dan global dari klien dan kepentingan lintas negara.. Hal ini dicirikan dari lemahnya posisi pemerintahan Nigeria dalam hubungan ekonomi politik dengan pihak *SPDC*. Besarnya ketergantungan pemerintah pada industri minyak yang dijalankan oleh *SPDC*, membuat posisi pemerintah semakin Berbagai kelemahan tersebut dapat dilihat dari tidak dijalankannya regulasi *EIA* yang seharusnya menjadi kewajiban setiap perusahaan minyak seperti *SPDC*. Pemerintah juga menutup mata akan berbagai temuan dan fakta mengenai degradasi lingkungan yang dilakukan oleh *SPDC*. Pemerintah rezim militer Nigeria begitu rapuh dan lemah terhadap kekuatan Perusahaan Multinasional seperti *SPDC* yang merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalis global yang didominasi oleh negara – negara maju.

Peraturan hukum lokal, seperti halnya prinsip dasar ekonomi, selalu digunakan untuk merasionalisasi berbagai praktek yang dilakukan oleh *SPDC*. Misalnya saja, tanggungjawab kepada negara ditunjukkan hanya dengan melakukan perbaikan dalam perjanjian yang hanya mengikuitsertakan elit - elit politik tertentu, maupun dengan adanya kesediaan perusahaan minyak tersebut untuk melakukan resolusi konflik dan perbaikan (dalam hal perjanjian). Sementara di sisi lain, komunitas masyarakat lokal seperti Ogoni justru menginginkan dilakukan perubahan tidak hanya sebatas formalitas belaka. Argumen ini bagaimanapun telah mengabaikan hubungan kekuasaan secara implisit di dalam prosedur dan struktur institusional. kelemahan pemerintah Nigeria berhadapan dengan perusahaan minyak seperti *SPDC*, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut secara efektif mengontrol proses penilaian, negosiasi, dan pembayaran kompensasi.

Besarnya ketergantungan ekonomi politik akan industri minyak yang dijalankan *SPDC* membuat negara semakin menjadi rapuh dan rentan untuk melakukan berbagai tindakan apapun yang menghalangi kepentingan *SPDC* di

Nigeria, termasuk di dalamnya masyarakat Ogoni. Negara, tanpa berpikir panjang, telah menjamin dan bahkan melakukan penjagaan terhadap sejumlah instalasi minyak *SPDC* di Ogoni dari kemungkinan pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat. Negarapun bahkan tidak segan untuk melakukan sejumlah skenario dan rencana jahat dengan pihak *SPDC* terhadap masyarakat Ogoni. Berbagai rencana pembersihan etnis Ogoni yang di baliknya ada peran dari *SPDC* sebagai pihak penyandang dana, telah menjadi kenyataan yang cukup pahit dan menyakitkan bagi masyarakat Ogoni, terutama akan fungsi, keadaan dan posisi pemerintah Nigeria sendiri yang terjadi begitu lemah jika dihadapkan dengan kapitalis internasional seperti *SPDC*.

